

MANAJEMEN PASCA BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN DI KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2021

Rut Aksamina Aronggear
NPP. 30.1527

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: ruf.aronggear@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the fire that occurred in Manokwari Regency which is a fire disaster that often occurs due to the density of residents' houses and narrow areas, causing an electrical short circuit and causing many residents to lose their homes and property. **Purpose :** The purpose of this research is to explore the efforts made after the fire in Manokwari District. **Method :** This research method uses descriptive analysis method by collecting data through interviews and document study, followed by data reduction, presentation, and conclusion stages. **Result :** The findings obtained, the government of Manokwari Regency has carried out post-disaster management in its entirety, including preparedness socialization, forming a Task Force team and Quick Response Team, establishing SOPs for disaster management, and fire emergency response by providing fire trucks, disaster volunteer teams, and shelters for disaster victims. **Conclusion :** Even though the Regional Disaster Management Agency for Manokwari Regency still lacks facilities and infrastructure, disaster management in Manokwari Regency is carried out by taking into account the principles of disaster management.

Keywords: Management; Post-Disaster; Post-Disaster Reconstruction; Rehabilitation

ABSTRAK

Permasalahan/Latar belakang (GAP) : Penulis berfokus pada kebakaran yang terjadi di Kabupaten Manokwari yang merupakan bencana kebakaran yang sering terjadi dikarenakan padatnya rumah warga dan wilayah yang sempit sehingga menyebabkan terjadinya korsleting listrik dan mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. **Tujuan :** Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi upaya yang dilakukan setelah terjadinya kebakaran di Kabupaten Manokwari. **Metode :** Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen, diikuti oleh tahap reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** Temuan yang diperoleh, pemerintah Kabupaten Manokwari telah melaksanakan manajemen pasca bencana dengan menyeluruh, termasuk sosialisasi kesiapsiagaan, pembentukan tim Satgas dan Tim Respon Cepat, penetapan SOP penanggulangan bencana, dan tanggap darurat kebakaran dengan menyediakan mobil damkar, tim relawan bencana, dan tempat penampungan korban bencana. **Kesimpulan :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Manokwari meskipun masih kekurangan sarana dan prasarana, penanggulangan bencana di Kabupaten Manokwari dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip penanggulangan bencana.

Kata kunci: Manajemen; Pasca Bencana; Rekonstruksi; Rehabilitasi Pasca Bencana

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di dunia. Setiap provinsi di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang berbeda. Kepadatan penduduk ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi suatu wilayah, misalnya banyak sampah rumah tangga menumpuk, banyak penyakit yang dapat timbul, bangunan dengan tata letak yang tidak teratur dan banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena adanya arus pendek listrik. Perlu disadari bahwa yang dapat dianggap berbahaya dan mengancam dengan banyaknya penduduk ini adalah bencana kebakaran. Bencana kebakaran berdampak buruk bagi masyarakat karena banyak kerugian yang dapat terjadi. Bencana kebakaran sendiri tidak dapat dihindari karena tidak bisa diprediksi kapan itu akan datanag, terjadi, penyebabnya apa, dan bagaimana pengaruhnya jika terjadi. Kebakaran di permukiman biasanya menimbulkan banyaknya akibat buruk yang dapat mengganggu kegiatan masyarakat yang juga memiliki risiko potensi yang tinggi. Bencana kebakaran sendiri adalah suatu kejadian dimana terjadinya nyala api yang dapat disebabkan oleh alam sendiri ataupun ulah manusia. Bencana kebakaran yang dapat terjadi karena ulah manusia umumnya terjadinya pada wilayah perkantoran, perumahan ataupun tempat umum seperti toko ataupun pasar. Di Indonesia, bukan hanya kebakaran yang disebabkan oleh alam tetapi juga kebakaran nonalam (faktor manusia). Kebakaran yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia yang ramai penduduknya adalah daerah permukiman warga, salah satunya di kabupaten Manokwari. Salah satu bencana yang barubaru saja terjadi di kabupaten Manokwari ini adalah kebakaran permukiman warga.

Tabel 1.

Jumlah Kejadian Kebakaran di Provinsi Papua Barat Tiga Tahun Terakhir

| KABUPATEN | KEBAKARAN |
|-------------------|-----------|
| Kota Sorong | 7 kali |
| Kabupaten Sorong | 1 kali |
| Sorong Selatan | - |
| Manokwari | 5 kali |
| Manokwari Selatan | - |
| Kaimana | 3 kali |
| Fak-fak | 4 kali |
| Teluk Bintuni | 2 kali |
| Teluk Wondama | 1 kali |
| Pegunungan Arfak | - |
| Tambrau | - |
| Raja Ampat | 1 kali |

Sumber : BPS 2021 (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan tabel di atas bahwa kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kebakaran terbanyak setelah Kota Sorong. Beberapa kejadian kebakaran di Kabupaten Manokwari disebabkan karena tegangan listrik yang korslet sehingga berakibat pada kebakaran permukiman, gedung dan usaha warga. Hal ini menyebabkan banyak warga kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan harta bendanya. Jumlah kejadian kebakaran yang terjadi di Kabupaten Manokwari dalam tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.

Rekapan Kejadian Bencana Kebakaran dari Tahun 2019-2021

| TAHUN | JUMLAH |
|-------|--------|
| 2019 | 2 |
| 2020 | 1 |
| 2021 | 2 |

Sumber : diolah oleh peneliti (2022)

Seiring berjalannya waktu pembangunan terus meningkat. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari menjadi salah satu wilayah yang rentan terjadi bencana kebakaran. Penyebab terjadinya bencana kebakaran di Kabupaten Manokwari adalah meningkatnya jumlah penduduk, banyak bangunan yang tidak sesuai dengan standar operasional serta fasilitas yang minim dari petugas pemadam kebakaran. Salah satu bencana kebakaran yang terjadi di Kabupaten Manokwari adalah bencana kebakaran yang terjadi di Perumahan Nelayan Borobudur, Kelurahan Padarni Manokwari, Papua Barat pada tanggal 30 September 2021. Berdasarkan informasi dari papuabarat.antaranews.com lebih dari 400 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Adapun korban dari kebakaran di Perumahan Nelayan Borobudur hampir seluruhnya berprofesi sebagai nelayan dan sebagian masyarakat merupakan perantau dari Buton, Sultra.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 35 dan 36 memperhatikan bahwa setiap daerah yang terlibat dalam penanggulangan bencana memiliki strategi penanggulangan bencana. Ketentuan pokok undang-undang ini tertuang dalam teksnya dan termasuk yang ditujukan untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana yang berada di bawah lingkup dan kewenangan pemerintah pusat serta pemerintah daerah dilaksanakan secara terencana, teratur, terkoordinasi, dan cara yang menyeluruh. Di dalam penanggulangan daerah juga diperoleh unsur pengarah dan unsur pelaksana. Badan tersebut memiliki tugas dan fungsi yang terdiri dari proses dan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu selaras dengan kewenangannya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Berdasarkan pada kasus tersebut penulis melihat banyak masyarakat bahwa pemahaman masyarakat tentang bencana masih rendah. Jika hal ini terus dibiarkan tanpa ada pemecahan maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri. Sehingga perlu menciptakan desa tangguh bencana yang memiliki kemampuan dalam manajemen bencana, diperlukan pengembangan kapasitas kelembagaan

yang memadai. Kapabilitas dalam manajemen bencana keikutsertaan multistakeholder dalam mendukung terwujudnya Desa Tangguh Bencana. Program desa tangguh bencana merupakan salah satu cara untuk dapat menurunkan resiko bencana yang berbasis pada masyarakat. Oleh karena itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang analisis penanggulangan pasca bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari. Judul penelitian ini adalah "Manajemen Pasca Bencana Kebakaran Permukiman di Kabupaten Manokwari Tahun 2021". Rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana manajemen pasca bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari? 2) Apa saja faktor-faktor yang menghambat jalannya proses manajemen pasca bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari? Penelitian ini akan menghasilkan hal yang berguna, antara lain: 1) Memberikan manfaat bagi praja dan peneliti dalam hal pengetahuan dan pengalaman baru serta sebagai syarat penyelesaian pendidikan. 2) Memberikan masukan positif dan gambaran upaya dalam menangani bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga dapat memberikan masukan bagi lembaga setempat. 3) Menjadi bahan referensi bagi Institut Pemerintahan Dalam Negeri dalam mengkaji bidang Manajemen Penanggulangan Bencana, serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan literatur yang bermanfaat bagi praja dalam penelitian-penelitian masa depan terkait penelitian yang relevan.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti telah mengkaji berbagai aspek manajemen penanggulangan bencana. (Farichatun Nisa', 2014; Nugroho & Maturbongs Jln Essau Sesa Sowi Gunung, 2019) melakukan kajian mengenai pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik campuran wawancara dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pengendalian Perubahan Iklim dan Kebakaran Hutan untuk Lahan (BPPIKHL) di Maluku dan Papua telah efektif dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengurangan titik api secara langsung ke lokasi yang rentan terhadap kebakaran.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Farichatun Nisa', 2014; Fedryansyah et al., 2018) mengkaji manajemen penanggulangan bencana banjir, puting beliung, dan tanah longsor di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi dokumentasi. Peneliti menggunakan teori manajemen bencana dalam menganalisis tindakan yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jombang dalam tahapan response, recovery, dan development. Tujuan utama dari penanggulangan bencana ini adalah untuk mengurangi tingkat risiko terjadinya bencana di daerah tersebut.

Penelitian (Fedryansyah et al., 2018) mengenai penanggulangan bencana di masyarakat desa, yakni di Desa Cipacing, Desa Cileles, dan Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara dan FGD. Konsep yang digunakan adalah siklus manajemen bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa memiliki peran penting dalam ketiga tahapan penanggulangan bencana, namun pemahaman mereka terkait penanggulangan bencana masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, (Ratna Kusumaningsih, 2012) melakukan analisis sistem pencegahan, penanggulangan, dan tanggap darurat terhadap kebakaran di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia pada tahun 2012. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan komparatif dan kualitatif. Teori perilaku manusia dalam kebakaran digunakan sebagai dasar analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia (SDM) kurang, prosedur tanggap darurat belum ada, dan pelatihan tanggap darurat belum dilakukan secara memadai. Namun, sistem proteksi di dalam gedung aktif.

Penelitian terakhir yang disebutkan dilakukan oleh (Eko Budi Santoso, 2013) mengenai manajemen risiko bencana banjir kali Lamong pada kawasan periurban Surabaya-Gresik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara. Konsep yang digunakan adalah manajemen risiko bencana. Penelitian ini menekankan pentingnya pengendalian terhadap daya rusak air sebagai upaya dalam mengurangi risiko terjadinya bencana banjir. Pengendalian ini dilakukan baik pada tahap pra bencana maupun pada tahap pasca bencana. Dalam penelitian ini, Santoso mengidentifikasi beberapa langkah penting dalam manajemen risiko bencana banjir, termasuk pemantauan dan evaluasi kondisi sungai, pengaturan tata ruang wilayah yang memperhatikan aspek mitigasi bencana, penyusunan rencana tanggap darurat, dan pemberdayaan masyarakat dalam memahami dan mengatasi risiko banjir. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk mengimplementasikan strategi pengelolaan risiko bencana yang lebih efektif di kawasan periurban Surabaya-Gresik.

Berdasarkan penelitian terdahulu, diketahui bahwa studi mengenai penanggulangan bencana mayoritas menggunakan pembagian dimensi sebelum, sesaat dan sesudah bencana. Secara konseptual, terdapat studi yang menyebut hal ini sebagai tahapan penanggulangan bencana serta terdapat pula yang menekankan pada sifat penanggulangannya sebagai sebuah siklus yang tidak terpotong. Dalam penelitian ini, penanggulangan bencana akan dilihat sebagai tahapan yang perlu berkelanjutan atau juga disebut sebagai siklus manajemen bencana.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Referensi menarik dari studi terdahulu ditemukan terkait penekanan pada peran stakeholder khususnya masyarakat sekitar dalam mendukung proses penanggulangan bencana. Kajian terdahulu menemukan bahwa pendekatan manajemen berbasis masyarakat dapat membawa dampak yang lebih positif dan berkelanjutan pada upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, selain menjadikan tindakan pemerintah, dalam hal ini BPBD Manokwari, sebagai objek utama penelitian, peran stakeholder juga akan diulas sebagai faktor pendukung yang vital dalam penanggulangan bencana kebakaran.

Pembahasan terkait manajemen pasca bencana secara umum kemudian menjadi menarik diteliti untuk memperkaya referensi terkait topik yang diteliti dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh UN (United Nation) pada 2005-2015 yang tercantum dalam Kerangka Aksi Hyogo menuliskan bahwa negara-negara yang mengalami lebih banyak bencana memiliki rasa sadar keselamatan yang lebih tinggi dan memiliki kerangka berpikir bahwa pelajaran yang diambil dalam mengatasi bencana harus selalu diingat, sebagaimana yang dilakukan Jepang pada

Hari Pengurangan Bencana Nasional dalam mengenang Gempa Besar Kanto 1923 (UN, 2011). UN (2011) menyatakan bahwa Jepang telah menjadikan manajemen pengurangan risiko bencana sebagai prioritas nasional dan kesadaran risiko bencana bervariasi tergantung pada perbedaan sosial, tingkat pendidikan, dan lokasi geografis, yakni semakin tinggi risiko di suatu wilayah geografis, maka semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat di wilayah tersebut terhadap manajemen pengurangan risiko bencana.

Studi terkait penanggulangan bencana pada umumnya membutuhkan data dan pengkajian mendalam dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai kerangka metode dalam menjelaskan kasus kebakaran pemukiman di daerah Manokwari tahun 2021. Oleh karena itu, referensi penelitian terdahulu di atas dapat memberikan gambaran eksekusi pengumpulan dan analisis data yang tepat untuk mengkaji penanggulangan pasca bencana kebakaran pemukiman di Kabupaten Manokwari melalui manajemen bencana yang dapat melengkapi gap penelitian tentang bencana kebakaran pemukiman, khususnya di Kabupaten Manokwari yang jarang dibahas di Indonesia.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk: 1) Mendeskripsikan program dari manajemen pasca bencana kebakaran yang dilakukan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari. 2) Mencari dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat jalannya proses dalam bencana kebakaran melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam mengkaji fenomena bencana kebakaran perumahan di Kabupaten Manokwari adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengungkapkan gejala atau fenomena secara holistik dan kontekstual Muslich (2009), dengan memandang bencana kebakaran sebagai fenomena yang menjadi konteks pembahasan secara mendalam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik untuk memahami dan memaknai fenomena penanggulangan pasca bencana kebakaran.

Operasionalisasi konsep dilakukan dengan menurunkan konsep-konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang mudah dipahami dan dapat diukur (Ismail, 2015). Dalam teori siklus manajemen bencana dari Khan dkk (2008) yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini yaitu post-disaster (paska bencana). Konsep-konsep dari teori siklus manajemen bencana digunakan sebagai pisau analisis, dan juga dipadukan dengan regulasi internal pemerintah Kabupaten Manokwari mengenai Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, serta data sekunder berupa data yang diperoleh dari hasil studi dokumen Riduwan (2009). Informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan (Sugiyono, 2015).

Dalam penelitian ini, terdapat kriteria penentuan sumber data yang meliputi tiga aspek. Pertama, pihak pemerintah yang bertanggung jawab dan/atau terlibat dalam penanggulangan pasca bencana kebakaran pemukiman di Kabupaten Manokwari. Hal ini mencakup berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang terlibat dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran. Kriteria kedua mencakup lembaga, kelompok, atau masyarakat non-pemerintah yang turut terlibat dalam penanggulangan pasca bencana kebakaran di Kabupaten Manokwari. Ini mencakup organisasi, LSM, kelompok masyarakat, atau individu yang aktif dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran dan memiliki kontribusi yang relevan dalam konteks penelitian ini. Kriteria ketiga adalah individu atau masyarakat yang terdampak kerugian dari bencana kebakaran pemukiman di Kabupaten Manokwari. Ini mencakup orang-orang yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh bencana kebakaran, baik itu dalam hal kerugian materiil, fisik, psikologis, atau aspek lain yang berkaitan dengan kebakaran perumahan di daerah tersebut. Dengan melibatkan semua aspek ini, penelitian dapat mendapatkan informasi yang komprehensif tentang penanggulangan pasca bencana kebakaran di Kabupaten Manokwari.

Instrumen penelitian berupa panduan pengumpulan data baik untuk wawancara maupun studi dokumen (Arikunto, 2006). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara sistematis/terstruktur dan studi dokumen Moleong (2004). Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan, memilah, mengelompokkan, mencari pola dan poin penting dari data yang telah dikumpulkan (Bogdan dan Biklen, Moleong, 2012). Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menganalisis, menggambarkan, dan meringkas kondisi dan situasi yang dikumpulkan dari hasil wawancara dan studi dokumen Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2012).

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan fokus pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari. Jadwal kegiatan penelitian mengacu pada kalender akademik Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2022/2023.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Manokwari

Kabupaten Manokwari terletak di bagian utara Pulau Papua dengan topografi yang beragam, mulai dari dataran rendah, perbukitan, hingga pegunungan. Wilayah ini memiliki luas sekitar 14.268 km² dan dihuni oleh sekitar 166.048 jiwa yang tersebar di 29 Distrik, 9 Kelurahan, dan 408 Kampung. Distrik Manokwari Barat memiliki jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Distrik Manokwari Utara memiliki jumlah penduduk paling sedikit.

Secara geografis, Kabupaten Manokwari berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, Kabupaten Teluk Wondama di sebelah timur, Kabupaten Teluk Bintuni di sebelah selatan, serta Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan di sebelah barat. Wilayah ini memiliki iklim tropis dengan curah hujan yang signifikan sepanjang tahun. Terdapat dua gunung di wilayah Kabupaten Manokwari, yaitu Gunung Awiwatsi dan Gunung Bijenkore. Kondisi demografi Kabupaten Manokwari mengalami pemekaran menjadi tiga wilayah kabupaten yang berbeda, yakni Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, dan Manokwari Pegunungan Arfak. Jumlah penduduk Kabupaten Manokwari pada tahun 2020 tercatat sebanyak 100.006 laki-laki dan 92.657 perempuan. Sektor pertanian merupakan sektor utama yang banyak diminati oleh penduduk di Kabupaten Manokwari karena wilayah ini memiliki potensi pengembangan pertanian.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manokwari bertanggung jawab atas penanggulangan bencana di wilayah tersebut. BPBD Kabupaten Manokwari melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap risiko bencana, serta melakukan koordinasi antara instansi terkait dalam penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Manokwari juga memiliki tugas dalam pemantauan cuaca, pemetaan daerah rawan bencana, sosialisasi, edukasi, dan tindakan penanggulangan bencana. BPBD Kabupaten Manokwari memiliki struktur organisasi yang melibatkan beberapa seksi dan bekerja sama dengan instansi terkait serta masyarakat setempat.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Manajemen Pasca Bencana termasuk di dalam manajemen penanggulangan bencana yaitu upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat dan setelah bencana. Penanggulangan bencana kebakaran adalah upaya yang dilakukan pada setelah terjadinya kebakaran untuk mempercepat proses pemulihan kembali di segala aspek. Proses pemulihan yang dimaksud meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Penanggulangan Pasca Bencana merupakan upaya ketiga yang harus dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manokwari dan juga pemerintah daerah setempat untuk memberikan pemulihan baik masyarakat dan sarana, prasarana. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pasca kebakaran dapat dikategorikan ke dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Beberapa tindakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Manokwari yaitu dengan memberikan bantuan berupa makanan dan tempat tinggal agar masyarakat yang terkena dampak dari bencana tersebut dapat merasa diperhatikan dan mendapat kehidupan yang layak seperti sebelum terjadi bencana. Berikut penjelasan kegiatan-kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pertama, kebijakan pemulihan korban bencana. Kebijakan yang dibuat oleh BPBD Kabupaten Manokwari di dalam memulihkan keadaan korban bencana yaitu dengan melakukan beberapa kegiatan yang langsung diterapkan agar korban bencana dapat segera pulih dan tidak mengalami trauma berat. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari, Bapak Ir. Tajuddin saat wawancara pada 11 Januari 2023 menyatakan bahwa:

“Kebijakan yang dibuat dalam mengatasi pasca bencana yang ada, dilakukan dengan membuat beberapa aturan dan juga kegiatan yang dapat dilakukan mengatur jalannya kegiatan evakuasi. Kami pun berusaha memberikan beberapa kegiatan positif yang dapat memberikan dampak positif kepada warga korban bencana agar dapat segera keadaannya baik secara materi maupun mental. Karena dilihat dari total jumlah kepala keluarga yang ada, jumlah anak-anak yang ada pun sangat banyak dan perlu diperhatikan terutama Kesehatan mereka. Karena anak-anak merupakan generasi bangsa, jadi dari kami pihak pemerintah setempat akan mengusahakan kegiatan-kegiatan bermanfaat untuk ibu-ibu dan anak-anak.”

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan Kepala bidang Rehabilitasi & Rekonstruksi, Bapak Agus Sulistiawan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 bahwa dalam masa pemulihan korban bencana terutama pada saat terjadinya kebakaran permukiman di Borobudur kabupaten Manokwari, BPBD melakukan Kerjasama dengan pihak Kesehatan dalam rangka memberikan pemulihan keadaan psikologis, terutama pada anak-anak kecil dan Wanita hamil dikarenakan dapat menyebabkan perubahan perilaku dan stress. Oleh karena itu, dengan adanya Kerjasama dengan pihak Kesehatan masyarakat korban bencana dapat segera teratasi dengan memberikan penyuluhan dan bimbingan psikologis selama sebulan awal kejadian kebakaran.

Penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait dengan bantuan pemulihan kondisi psikologi anak-anak dan Wanita korban bencana kebakaran di wilayah itu, wawancara yang dilakukan dengan warga salah satunya bapak Muhammad Ismail pada 12 Januari 2023 mengatakan bahwa:

Saya selaku perwakilan dari warga yang mengalami bencana kebakaran yang terjadi karena korsleting listrik ini, cukup bersyukur dengan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan bantuan bagi warga terutama Wanita dan anak-anak karena mereka kaum yang sangat memerlukan perhatian yang cukup. Kemudian kegiatan positif yang diberikan untuk anak-anak yang mengalihkan pikiran mereka ke hal yang menyenangkan membantu kami untuk tidak mengkhawatirkan anak-anak kami karena mereka tidak akan mengalami trauma.

Berdasarkan keterangan dari warga bahwasannya warga telah mendapat bantuan itu dan sudah cukup sangat membantu sehingga trauma dari anak-anak kecil dapat segera teratasi dan membiasakan mereka dengan keadaan yang ada atau memperkenalkan lingkungan baru yang harus diterima dan mengubah mindset anak-anak kecil agar dapat menerima kenyataan dan memberikan hal-hal positif seperti mengajak bernyanyi dan bermain agar mereka merasa terhibur. Para Wanita hamil pun diberikan tes Kesehatan agar mereka tidak mengalami stress dan kecemasan yang mempengaruhi Kesehatan bayi.



Gambar 1 Bantuan Berupa Sembako

Dari gambar tersebut dapat dilihat salah satu kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten didalam memberikan bantuan berupa makanan dan keperluan lainnya agar dapat terpenuhi kebutuhan sementara. Meskipun demikian, tetapi masyarakat masih merasa kekurangan karena bantuan tidak dapat di kasih setiap saat dan karena banyaknya korban bencana sehingga terkadang pembagian belum merata. Ketua RT 03, Bapak La Anto menyampaikan pada saat wawancara tanggal 13 Januari 2023 bahwa:

“Saya melihat bahwa pada saat kejadian kebakaran terjadi, dan setelah itu di evakuasi oleh damkar, para aparat dan beberapa bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten yang dimaksudkan yaitu BPBD, hanya pada bulan pertama dan kedua kami warga setempat yang terkena dampak bencana kebakaran ini diperhatikan lewat dari itu, kami pun sudah tidak diperhatikan lagi terutama dari sisi bantuan air bersih, dan komunikasi antara kami dengan pemerintah kabupaten yaitu BPBD. Saya yang sering mewakili suara warga yang ada disini untuk menghadap meminta kejelasan dari pemerintah pun terkadang belum jelas. Kami hanya tau bahwa akan ada pembangunan untuk tempat tinggal kami, tetapi sudah hamper dua tahun ini belum ada yang berjalan.”

Hal ini sangat disayangkan oleh Ketua RT 03, Bapak La Anto karena warganya yang masih belum terpenuhi kebutuhannya. Adapun adanya bantuan-bantuan dari Lembaga masyarakat, tetapi hanya di awal saja. Oleh karena itu, masyarakat tetap berusaha untuk bekerja meskipun dalam keadaan yang sulit akibat bencana.

Kedua, pelayanan Kesehatan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bapak Dr. Musa, mengatakan bahwa:

“Beberapa pelayanan yang diberikan bagi korban bencana kebakarn pada saat itu salah satunya pemberian pemeriksaan Kesehatan gratis dan pemberian obat gratis secukupnya karena mempertimbangkan adanya ibu hamil dan juga susu gratis untuk anak-anak balita yang ada agar dapat menunjang Kesehatan warga korban bencana. Meskipun begitu, tetap saja adanya kendala yang dialami dari bagian Kesehatan dengan kurangnya tenaga medis, tetapi kami tetap berusaha untuk dapat mengkoordinasi dengan dinas lainnya bahkan bagian dari TNI agar mendapatkan bantuan tenaga yang cukup.”

Unit pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Manokwari memiliki keterbatasan jumlah dokter. Hanya ada 6 dokter umum yang tersedia di Puskesmas Sanggeng. Sementara itu, hanya terdapat 23 orang tenaga farmasi/apoteker yang dapat memberikan layanan konsultasi obat-obatan. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana kabupaten Manokwari khususnya setelah terjadi becana.

Selanjutnya, pada kondisi pengungsian, pelayanan kesehatan sering tidak memadai akibat kurangnya fasilitas kesehatan, jumlah dan jenis obat dan alat kesehatan yang terbatas, serta terbatasnya tenaga kesehatan. Kondisi ini dapat memperburuk masalah kesehatan yang muncul. Oleh karena itu, penanggulangan masalah kesehatan di pengungsian harus dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi lintas program dan sektor. Standar minimal pelayanan kesehatan pengungsi terdiri dari pelayanan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, dan surveilans gizi darurat. Selanjutnya, data dasar gizi harus dikumpulkan untuk menentukan status gizi dan melakukan kegiatan penapisan. Kegiatan pelayanan kesehatan reproduksi harus dilaksanakan dengan mencakup beberapa aspek seperti keluarga berencana, kesehatan ibu dan anak.

Ketiga, pemulihan sosial ekonomi sebagai upaya untuk memfungsikan kembali kegiatan dan/atau lembaga sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di daerah bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk menghidupkan kembali kegiatan dan lembaga sosial, ekonomi

(Hartono et al., 2022) dan budaya masyarakat di daerah bencana seperti sebelum terjadi bencana (Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2017). Badan Penanggulangan Bencana sendiri seperti wawancara pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 dengan Kepala Bidang III Rehab-rekon Bapak Drs. Frans, MM bahwa:

“Untuk mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi tidak mudah dikarenakan ada sekitar 400 kepala keluarga dan rata-rata semua mata pencaharaian dari mereka adalah nelayan dan tempat tinggal mereka yang telah terbakar ini berada di dekat tepi pantai terutama mengingat mereka adalah warga pendatang yang merupakan asli dari dari Buton. Membutuhkan proses untuk dapat memulihkan keadaan social yaitu kehidupannya ke semula dan ekonomi mereka, tetapi kami akan terus berusaha untuk dapat memberikan dulu bantuan seadanya sehingga mereka dapat mencari pekerjaan Kembali ataupun Kembali menjadi nelayan.”

BPBD Kabupaten Manokwari memiliki serangkaian langkah yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan korban bencana. Langkah pertama adalah melakukan identifikasi korban dengan cepat dan akurat agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya, BPBD harus menyediakan tempat pengungsian yang aman, nyaman, dan memadai bagi korban yang kehilangan tempat tinggal. Bantuan sosial seperti makanan, air bersih, pakaian, dan perlengkapan tidur juga harus diberikan kepada korban yang membutuhkan.

Selain itu, BPBD Kabupaten Manokwari juga harus membantu korban yang terpisah dari keluarga mereka agar dapat bersatu kembali. Bantuan finansial perlu diberikan kepada korban yang kehilangan aset atau sumber penghasilan mereka akibat bencana. BPBD juga bertanggung jawab dalam membantu korban melakukan rehabilitasi, termasuk perbaikan rumah, sekolah, dan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana.

Dengan langkah-langkah ini, BPBD Kabupaten Manokwari berupaya untuk memulihkan korban bencana secara menyeluruh, memastikan kebutuhan mereka terpenuhi, dan membantu mereka dalam memulai kehidupan baru setelah menghadapi bencana yang menghancurkan.

Keempat, pelaksanaan pembangunan kembali tempat tinggal, sarana dan prasarana. BPBD Kabupaten Manokwari adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang bertanggung jawab untuk merespon bencana dan mengkoordinasikan upaya pemulihan pasca bencana di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Indonesia. Pelaksanaan pembangunan kembali tempat tinggal (rekonstruksi) setelah bencana adalah salah satu upaya pemulihan pasca bencana yang penting. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan pada tanggal 13 Mei 2023 bahwa:

“Kami dari pihak BPBD sudah mengkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk dapat memberikan bantuan berupa pembangunan tempat tinggal yang strategis dengan daerah tempat tinggalnya agar dapat memudahkan pekerjaan mereka. Mengingat para warga merupakan nelayan maka kami berusaha untuk dapat memberikan tempat tinggal yang dekat dengan pesisir pantai, dan kami telah mendapatkannya. Oleh karena itu dengan melakukan Langkah-langkah yang ada sehingga kami dapat melakukan evaluasi tempat tinggalnya.”

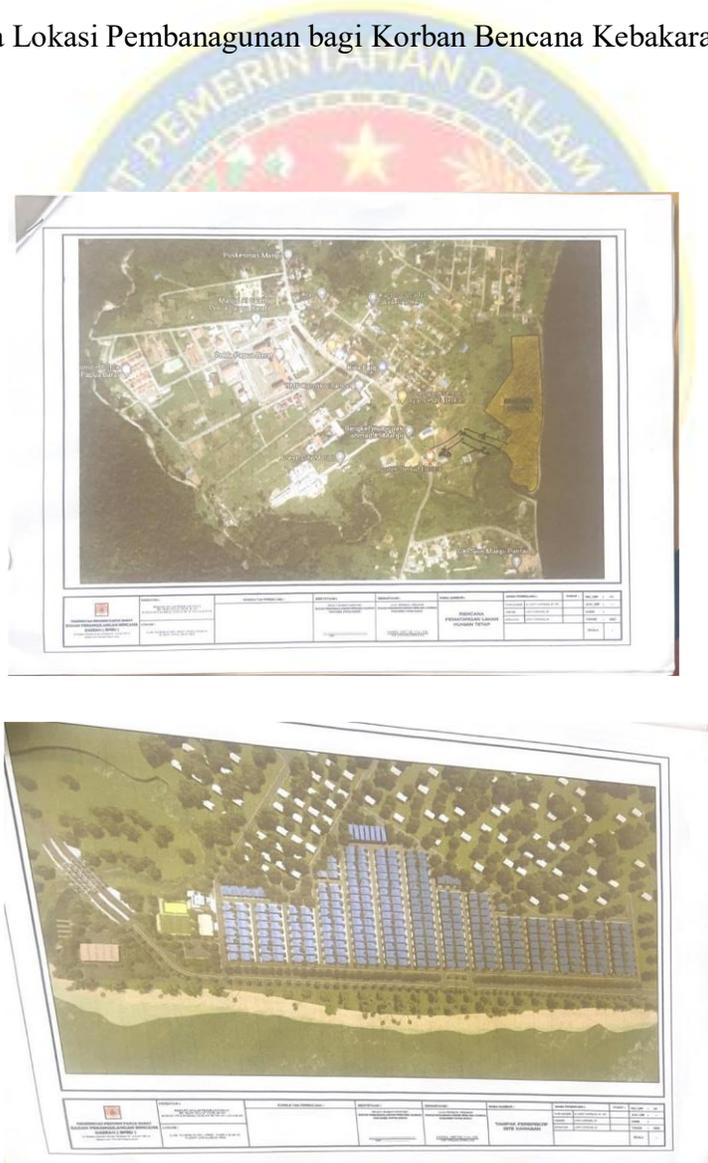
BPBD Kabupaten Manokwari memiliki beberapa langkah dalam manajemen pasca bencana. Langkah pertama adalah melakukan pendataan kerusakan yang terjadi pada tempat tinggal penduduk sebagai acuan dalam rekonstruksi. Selanjutnya, dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan prioritas dan jenis bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.

Setelah analisis kebutuhan, BPBD Kabupaten Manokwari merencanakan kegiatan rekonstruksi yang mencakup jenis bantuan, anggaran, waktu pelaksanaan, dan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah, LSM, dan relawan juga dilakukan untuk memastikan kesuksesan rekonstruksi. Setelah perencanaan dan koordinasi selesai, BPBD Kabupaten Manokwari memulai pelaksanaan rekonstruksi dengan melibatkan masyarakat setempat. Proses ini harus dilakukan secara terstruktur dan terencana. Selanjutnya, BPBD melakukan monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan rekonstruksi untuk menilai keberhasilannya, mengevaluasi kegiatan yang kurang efektif, dan mengidentifikasi kelemahan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan di masa yang akan datang. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, BPBD Kabupaten Manokwari berupaya untuk mengelola pasca bencana dengan efektif dan efisien, memastikan pemulihan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat, serta membangun kembali tempat tinggal yang rusak akibat bencana.

Terkait dengan tindakan pemulihan dan perbaikan infrastruktur ini, BPBD kabupaten Manokwari di dalam menangani kasus kebakaran permukiman Borobudur ini telah menyediakan lahan untuk pembangunan kembali hunian bagi warga korban bencana kebakaran tersebut. Dengan terdapat 400 kepala keluarga, diantar mereka pemberian hunian gratis dari pemerintah daerah hanya diberikan bagi warga yang memiliki rumah tetap di lokasi kebakaran yang sudah terbakar karena kejadian itu. Sedangkan untuk yang tidak memiliki rumah tetap atau yang menyewa rumah di lokasi kebakaran itu, tidak mendapat hunian yang disediakan bagi warga korban yang hanya menyewa, karena sudah ada perjanjian antara pemerintah dengan warga setempat.

Gambar 2. Peta Lokasi Pembangunan bagi Korban Bencana Kebakaran Borobudur



Kedua gambar di atas menunjukkan lokasi perumahan yang akan dibangun kembali untuk dapat ditinggali oleh korban yang memiliki rumah tetap terbakar, dengan gambar pertama adalah lokasi sebelum pembangunan dimana disitu masih ada rumah penduduk yang belum di ratakan. Dan gambar kedua adalah gambar setelah sudah diratakan dan bentuk perumahannya dari atas.

Terakhir, partisipasi dan peran lembaga dan organisasi masyarakat yang sangat penting dalam manajemen pasca bencana di BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Manokwari. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Pelaksana Bapak Ir. Tajuddin mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan Tindakan evakuasi dalam menangani bencana seperti ini, kami pihak BPBD tidak bisa melakukannya sendiri. Dengan melakukan Kerjasama dengan beberapa pihak seperti pihak LSM Ruangguru, Bank-bank, para pengusaha adanya tim relawan dari mahasiswa kami dapat menangani dan menjalankan bantuan dengan baik. Karena menurut saya, tidak semua dapat diharapkan dari pemerintah saja. Kami bahkan sangat ingin adanya Kerjasama dari pihak-pihak tersebut. Kami tentu saja sangat beryukur karena dapat meringankan pekerjaan. Kami pihak BPBD hanya sebagai Lembaga koordinasi agar dapat menyelesaikan bencana yang ada. Selain itu juga bantuan yang diberikan oleh TNI/POLRI sangat meringankan tugas dari Damkar dan Tim SAR.”

Lembaga dan organisasi masyarakat memiliki peran penting dalam manajemen pasca bencana. Tim relawan bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Manokwari untuk memberikan bantuan evakuasi, distribusi bantuan, dan pemulihan masyarakat pasca bencana. Organisasi keagamaan memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan psikologis kepada korban bencana melalui posko pengungsian dan layanan konseling.

LSM membantu dalam monitoring, evaluasi, advokasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat terkait risiko bencana dan mitigasi. Komunitas masyarakat lokal berperan dalam pemulihan lingkungan dan infrastruktur, seperti penghijauan, perbaikan saluran air, dan pembangunan jalan alternatif. Mereka juga membantu dalam pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana.

Lembaga pendidikan berperan dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko bencana serta upaya mitigasi. Mereka juga dapat menjadi pusat pengumpulan dan distribusi bantuan bagi korban bencana. Melalui peran-peran ini, lembaga dan organisasi masyarakat berkontribusi dalam membangun kembali komunitas yang terdampak oleh bencana dan membantu mereka dalam pemulihan yang berkelanjutan.

3.3. Faktor Penghambat

Pelaksanaan evakuasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manokwari tidak selalu berjalan dengan baik, melainkan sseringkali menemui berbagai hambatan, seperti yang disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manokwari saat diwawancarai pada 11 Januari 2023 bahwa:

“Selama melaksanakan kegiatan evakuasi bencana tentu ada berbagai hambatan, yang paling teras aitu dari segi sumber daya yang masih sangat sedikit. Jadi setiap anggota memiliki beban ganda, karena harus melaksanakan banyak tugas dalam pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran. Belum lagi hambatan berupa menyulitkan bagi pihak BPBD Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan evakuasi. Sumberdaya yang minim dan sarana prasarana yang tidak memadai ini berefek pada kurang maksimalnya kegiatan bencana banjir yang dilakukan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa salah satu hambatan dalam pelaksanaan mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Manokwari yakni sumber daya yang minim serta sarana dan prasarana yang belum memadai dan masih banyak yang kurang sehingga berdampak pada pelaksanaan

evakuasi bencana yang belum efektif. Hasil yang sama juga disampaikan oleh anggota BPBD Kabupaten Manokwari saat dilakukan wawancara pada 11 Januari 2023 juga memberikan tanggapan bahwa:

“Keterbatasan anggota menjadi hal yang menghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran oleh BPBD Kabupaten Manokwari. Karena seperti yang kita tahu, jumlah anggota hanya 15 orang saja, padahal tugas yang mesti dijalankan sangat banyak, sehingga kita para anggota mesti saling memiliki tugas ganda, agar mampu melakukan tugas mitigasi bencana. Contohnya meskipun dari bidang kedaruratan dan logistic, tapi juga mesti memberi arahan tentang apa saja yang mesti dilakukan saat terjadi bencana. Jadi memang setiap anggota mesti memiliki keterampilan yang baik dalam bidangnya masing-masing.”

Hambatan sumber daya yang minim memang memberikan dampak yang cukup dirasakan oleh BPBD Kabupaten Manokwari dalam melaksanakan manajemen pasca bencana. Adapun sekretaris BPBD Kabupaten Manokwari tanggal 13 Januari 2023 saat diwawancarai juga menyatakan:

“Hambatan lain dalam pelaksanaan evakuasi pasca bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manokwari juga bersumber dari dana yang masih minim. Karena sejauh ini, dana yang masuk hanya bersumber dari APBD, jadi nominalnya masih tergolong kecil. Belum cukup untuk mengcover seluruh kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Manokwari, khususnya untuk pelaksanaan evakuasi pasca bencana itu dananya belum ada secara khusus, jadi memang dari segi keuangan juga belum mendukung.”

Dana merupakan hal yang juga menghambat pelaksanaan evakuasi pasca bencana oleh pihak BPBD Kabupaten Manokwari. Karena sampai saat ini dana yang ada hanya berasal dari APBD dan jumlahnya terbatas, sehingga pihak BPBD Kabupaten Manokwari belum bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan mitigasi dengan efektif.

IV. KESIMPULAN

Dalam penelitian mengenai manajemen pasca bencana kebakaran permukiman di Kabupaten Manokwari, terdapat beberapa simpulan yang dapat dijabarkan. Pertama, manajemen pasca bencana di Kabupaten Manokwari dilakukan oleh pemerintah daerah melalui BPBD sebagai koordinator, namun masih terdapat keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan peralatan yang memadai. Hal ini menyebabkan program pembentukan tim respon cepat dan pos pusat data belum mampu mencakup semua daerah yang terdampak kebakaran. Kedua, penanggulangan pasca bencana kebakaran di Kabupaten Manokwari, khususnya di wilayah Permukiman Borobudur, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penanggulangan bencana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Meskipun demikian, terdapat hambatan dalam hal keterbatasan personil dan sarana saat terjadi bencana, serta kurangnya tempat penampungan sementara bagi korban bencana. Faktor-faktor penghambat ini menyebabkan kegiatan penanggulangan bencana dan pemberian bantuan berjalan lambat.

Sebagai saran, penulis menyarankan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari, khususnya BPBD, dapat mengutamakan penggunaan anggaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, penambahan jumlah personil untuk tim respon cepat dan pos pusat perlu dipertimbangkan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan efektif. Sarana dan prasarana BPBD juga perlu segera dipenuhi agar tidak menghambat kegiatan evakuasi. Kemudian, kekurangan kendaraan untuk membawa barang-barang bantuan perlu diatasi dengan memperoleh barang-barang pengadaan yang lebih murah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni saran dan prasarana yang ada di tempat penelitian. Selain itu juga, adanya kekurangan SDM para pegawai yang cukup tua lebih banyak digunakan disitu. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai studi kasus dalam penyelesaian atau penanggulangan yang ada di suatu wilayah itu.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Ruang Berbagi di Kabupaten Manokwari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Manokwari beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali

Eko Budi Santoso. (2013). *Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan*. *Jurnal Penataan Ruang*, 8(2).

Farichatun Nisa'. (2014). *Manajemen Penanggulangan Bencana Banjir, Puting Beliung, Dan Tanah Longsor Di Kabupaten Jombang*. *JKMP*, 2(2).

Fedryansyah, M., Pancasilawan, R., & Ishartono, I. (2018). *Penganggulangan Bencana Di Masyarakat Desa Studi Di Desa Cipacing, Desa Cileles, Dan Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang*. *Share : Social Work Journal*, 8(1), 11.
<https://doi.org/10.24198/share.v8i1.15961>

Khan, Himayatullah. L. Vasilescu, dan Asmatullah Khan. 2008.
“Disaster Management Cycle – A Theoretical Approach”. *Business Management and Marketing Journal* Volume 1, pp. 43 – 50

Nugroho, B., & Maturbongs Jln Essau Sesa Sowi Gunung, R. A. (2019). *Kajian pelaksanaan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Papua Barat*. *CASSOWARY*, 2(2), 114–127. <https://pasca.unipa.ac.id/>

Ratna Kusumaningsih. (2012). *Analisis sistem pencegahan penanggulangan dan tanggap darurat terhadap kebakaran di Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia tahun 2012*. Universitas Indonesia.

United Nation. 2011. *Hyogo Framework for Action 2005-2015: Building the Resillience of Nations and Communities to Disasters. Mid Term Review*

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Bupati Manokwari No. 101 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Manokwari
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

UU No. 23 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari

